

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDIKATOR KOMPOSIT IPM TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI BALI TAHUN 2004 – 2013

I Putu Arya Finkayana¹
Made Heny Urmila Dewi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: aryafinkayana@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang harus dituntaskan diberbagai daerah termasuk Bali. Salah satu penyebab kemiskinan adalah masalah aksesibilitas yang merupakan suatu akses/kemampuan seseorang untuk mendapatkan suatu kebutuhan dasar baik makanan, sandang, pendidikan, kesehatan dan hidup layak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata – rata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Untuk mengurangi kemiskinan, dapat ditempuh dengan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada sumberdaya alam dan SDM masing – masing kabupaten/kota di Bali. Kebijakan tersebut dapat berupa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan, pengembangan kewirausahaan, perbaikan sistem ketenagakerjaan, perbaikan fasilitas publik (kesehatan dan pendidikan) sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Kata Kunci: penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata - rata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran perkapita

ABSTRACT

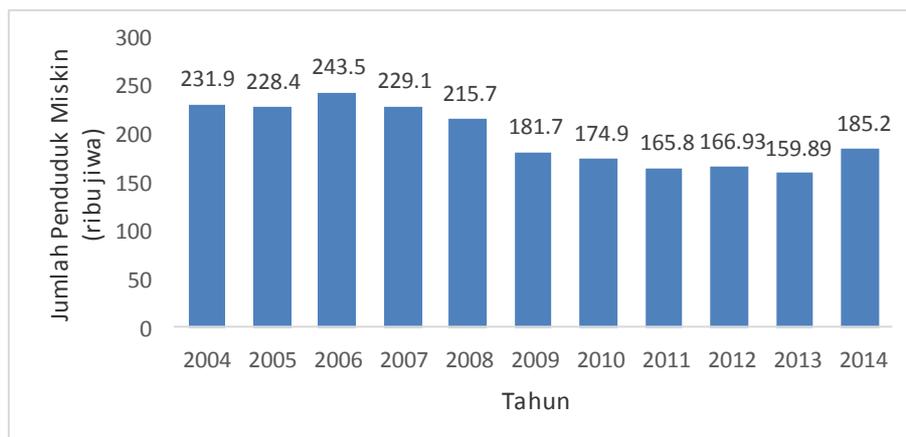
Poverty is one of the social problems that occur in various areas, including Bali. One of the causes of poverty is the accessibility issue which is an access / a person's ability to get a good basic needs of food, clothing, education, health and decent living. The purpose of this study was to analyze the effect of economic growth and human development index of the number of poor people in the province of Bali. Penelitian using secondary data from the years 2004 - 2013 and using data collection methods non-participant observation. The analysis technique used is multiple linear regression. Based on the analysis found that economic growth, life expectancy, average - the duration of schooling, literacy rates and per capita spending a significant negative effect on the number of poor people in the province of Bali. To reduce poverty, the government is expected to formulate development policies appropriate to their respective districts / municipalities in Bali Province. The policy may be increasing the opening of employment, entrepreneurship development, improvement of the system of employment, improvement of public facilities (health and education) that are expected to improve the welfare of the underprivileged.

Keywords: the poor , economic growth , life expectancy , average - the duration of schooling , literacy rates and spending per capita.

PENDAHULUAN

Dalam memperkuat suatu perekonomian agar dapat berkelanjutan perlu adanya suatu perhatian khusus terhadap pembangunan ekonomi. Perekonomian suatu negara sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut meliputi, pendapatan perkapita riil yang tinggi dan mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada serta mengurangi tingkat kemiskinan.

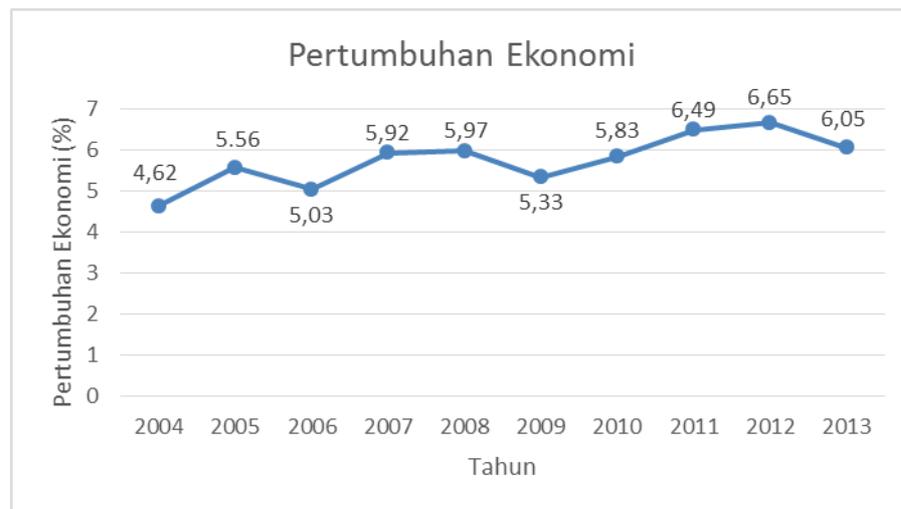
Otonomi Daerah memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam mengelola potensi- potensi di daerahnya melalui pengaturan kebijakan. Peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan daerah, pembangunan yang merata di tiap daerah serta pengurangan subsidi pemerintah akan suatu daerah. Menurut Oates, seperti dikutip Artanayasa (2014) kebijakan desentralisasi ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masalah tetap dihadapi oleh seluruh daerah di Indonseia, termasuk Bali dalam hal kemiskinan.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Kota + Desa) di Provinsi Bali Tahun 2004 - 2014 (dalam ribu jiwa)
Sumber : BPS (Bali Dalam Angka, 2014)

Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya tingkat urbanisasi penduduk dari desa ke kota akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di desa (Tinjauan Perekonomian Bali 2014). Hal ini diperparah dengan kondisi penduduk yang kurang memiliki keterampilan sehingga tidak memperoleh pekerjaan di kota dan menambah angka kemiskinan yang ada di perkotaan. Pemerintah Bali sendiri telah menetapkan pengentasan jumlah masyarakat kurang mampu sebagai tujuan utama pembangunan periode 2008 sampai dengan 2013 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD ditargetkan pengentasan kemiskinan bagi kaum yang tidak akan turun sebesar 174.510 atau sekitar 4,38% dari akumulasi total penduduk Bali keseluruhan.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Bali, dapat disebabkan juga karena adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin menurut Santosa (2013) dapat dengan peningkatan pendapatan, walaupun tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara umum Pertumbuhan Ekonomi Indonesia didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Sumatera dan Jawa yang tumbuh masing – masing sekitar 4,66 persen dan 5,59 persen.



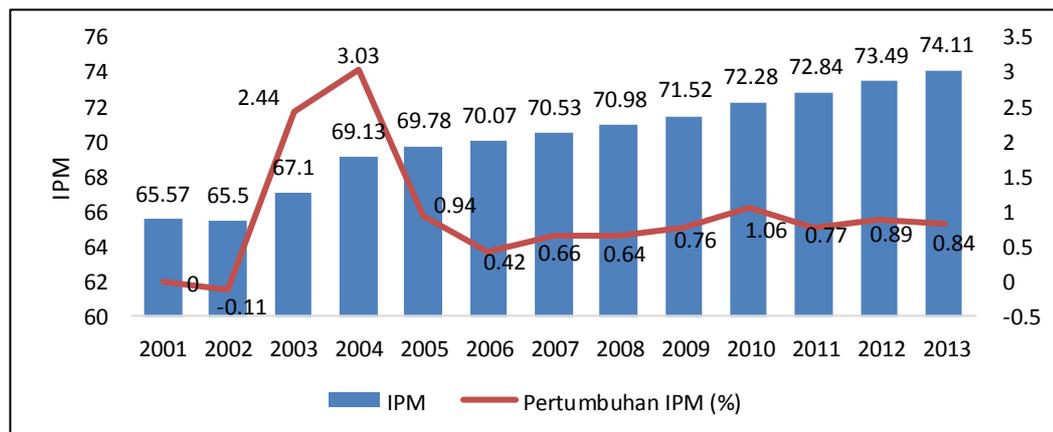
Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2010- 2014

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014 (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari peningkatan pembangunan suatu daerah namun juga dapat melalui proses pembangunan manusia. Untuk itu diperlukan pembangunan ekonomi yang terfokus pada pembangunan manusia secara kerakyatan dan berkesinambungan. Indunil and Sudarno (2014) menemukan bahwa tahun 2002-2012 pertumbuhan ekonomi menguntungkan bagi kenaikan daya beli (belanja) rumah tangga, tetapi keuntungan yang diperoleh penduduk miskin lebih rendah dibanding kaum elit (kalangan mampu). Pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus berkualitas, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan mampu menyerap tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata dan dapat dirasakan oleh penduduk. Pada akhirnya akan berpengaruh secara langsung pada peningkatan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan.

United Nations Development Programme (UNDP) mengembangkan suatu paradigma yang menyatakan pembangunan manusia merupakan suatu perluasan

Pilihan - pilihan bagi suatu masyarakat atau penduduk disuatu daerah. Dengan demikian, pembangunan masyarakat atau penduduk menjadi sarana untuk menggapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Untuk dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakanlah suatu indikator komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 3. Perkembangan Laju Pertumbuhan IPM Provinsi Bali kurun 2001 – 2013

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014 (data diolah)

Gambar 3. Menunjukkan bahwa IPM di Bali terus meningkat selama 12 tahun terakhir. Tahun 2004 IPM mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding tahun – tahun berikutnya. Pertumbuhan IPM tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dari tahun 2012. Meskipun angka IPM mengalami peningkatan, tetapi pertumbuhan IPM masih mengalami fluktuasi selama 13 tahun terakhir.

Perkembangan IPM dari tahun 2001 sampai 2013 masih berada pada tingkat menengah, hal ini tidak sebanding dengan keadaan ekonomi Bali yang terus meningkat serta, menghasilkan devisa yang besar melalui sumbangsih sektor pariwisata.

Rata-rata tingkat perkembangan IPM pada Provinsi Bali diasumsikan tergolong rendah, karena ditaksir masih berada dibawah 1%. Disamping itu, menurut BPS (Bali Dalam Angka, 2015) IPM Provinsi Bali sebesar 74,11 di atas IPM Indonesia sebesar 73,81. Posisi IPM Provinsi Bali memang berada di atas IPM Indonesia, namun masih perlu dilakukannya pengembangan pada mut modal manusia dalam bidang pendidikan, pendapatan, daya beli maupun kesehatan masyarakat oleh pemerintah Provinsi Bali secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan IPM setiap tahunnya. Pertumbuhan IPM di Bali sangat dipengaruhi oleh perkembangan IPM di tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali. IPM tiap – tiap daerah menggambarkan bagaimana pembangunan manusia yang ada disana.

Tabel 1.
Perkembangan IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali kurun waktu
2009 – 2013

No	Kabupaten/Kota	IPM				
		Th. 2009	Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013
1	Jembrana	72,45	72,69	73,18	73,62	74,29
2	Tabanan	74,26	74,57	75,24	75,55	76,19
3	Badung	74,49	75,02	75,35	75,69	76,37
4	Gianyar	72,43	72,73	73,43	74,49	75,02
5	Klungkung	70,19	70,54	71,02	71,76	72,25
6	Bangli	70,21	70,71	71,42	71,80	72,28
7	Karangasem	66,06	66,42	67,07	67,83	68,47
8	Buleleng	70,26	70,69	71,12	71,93	72,54
9	Denpasar	77,56	77,94	78,31	78,80	79,41
	Prov. Bali	71,52	72,28	72,84	73,49	74,11

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat perkembangan IPM di tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2009 – 2013 semuanya mengalami peningkatan. Namun, nilai IPM di beberapa kabupaten masih menunjukkan angka di bawah rata - rata IPM Provinsi Bali secara keseluruhan. IPM terendah berasal dari Kabupaten Karangasem dengan 68,47 selama periode 2009 hingga tahun 2013, sedangkan IPM tertinggi diperoleh Denpasar dengan 79,41. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang cukup jauh. Ketidakmerataan ini dapat disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan fasilitas kesehatan pada Kabupaten Karangasem, terlebih lagi Kabupaten Karangasem memiliki banyak permasalahan dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, permasalahan yang tengah dialami pemerintah daerah di Bali saat ini adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak selalu diikuti dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan (Santosa, 2013).

Berdasarkan Gambar 3, IPM Bali selama kurun waktu 2001 – 2013 terus mengalami peningkatan, namun jumlah penduduk miskin pada tahun tertentu juga meningkat misalnya, pada tahun 2012 persentase penduduk miskin meningkat sekitar 1,13 ribu orang atau bertambah sekitar 0,68 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, penduduk miskin di Provinsi Bali meningkat secara cukup signifikan sekitar 25,31 ribu orang atau bertambah sekitar 15,82 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan pada tahun yang sama.

Selain itu menurut Peacock dan Wiseman (dalam Mangkoesoebroto, 1993;173), pertumbuhan ekonomi menyebabkan pungutan pajak semakin tinggi. Apabila pertumbuhan ekonomi semakin tinggi maka tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah akan semakin tinggi, sehingga tingkat kesejahteraan daerah semakin tinggi pula dan dapat mengurangi kemiskinan yang ada.

Menurut Widodo, dkk (2011) bahwa tidak secara langsung alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik berpengaruh pada IPM ataupun kemiskinan, tetapi pengeluaran sektor publik dan IPM secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan tidak mampu berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam memengaruhi kemiskinan, jadi harus adanya interaksi dengan variabel lain (variable komposit IPM).

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakberdayaan seseorang atau suatu golongan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar yang layak, meliputi pangan dan non pangan. Alternatif yang digunakan dalam menentukan ukuran suatu kemiskinan adalah dengan membandingkan besaran tingkat konsumsi dengan akumulasi uang yang dibelanjakan orang dalam sebulan atau garis kemiskinan. Apabila tingkat konsumsi seseorang berada dibawah jumlah rata - rata konsumsi normal, dapat dikatakan termasuk dalam katagori miskin. Sedangkan menurut Nehen (2012:193) penduduk miskin merupakan penduduk yang tidak dapat memenuhi kebtuhan dasarnya karena tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup _atau yang berada di bawah garis kemiskinan kurang dari US\$ 1 paritas daya beli (PPP) per hari dalam dollar.

Berdasarkan uraian pada perumusan masalah dan tinjauan pustaka di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata- rata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.
- 2) Pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata- rata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran perkapita berpengaruh negatife dan signifikan secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diselenggarakan di Provinsi Bali. Lokasi tersebut dipilih dengan melihat angka pertumbuhan ekonominya yang belum sepenuhnya merata di setiap kabupaten/kota yang cenderung berfluktuatif. Terdapat satu jenis data yang dipakai yaitu data kuantitatif. Kemudian data kuantitatif dalam penelitian ini terdiri atas keterangan tentang PDRB yang didasarkan atas harga tetap (konstan), jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi dan indikator komposit IPM.

Variabel yang dipakai terdiri dari, (1) Pertumbuhan Ekonomi (X_1) adalah proses peningkatan hasil (output) perkapita pada suatu periode waktu yang lama (jangka panjang) yang ditentukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tahun yang berlaku saat ini dikurangi dengan PDRB sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya dikali 100% (d disesuaikan dengan harga konstan periode 2004 sampai dengan 2013), (2) Angka Harapan Hidup (X_2) adalah tingkatan daya hidup (umur) yang dapat dicapai oleh individu yang telah lahir pada tahun tertentu pada periode 2004 sampai dengan 2013 yang dinyatakan dalam satuan tahun, (3) Rata - Rata Lama Sekolah (X_3) adalah rata-rata dari banyaknya tahun yang diperlukan oleh penduduk diatas umur 15 tahun untuk mengenyam pendidikan, (4) Angka Melek Huruf (X_4) adalah perbandingan antara akumulasi dari penduduk berusia diatas 15 tahun yang dapat menulis dan membaca dengan akumulasi keseluruhan penduduk yang berumur 15 tahun untuk tahun 2004 sampai dengan 2013 dalam satuan persen, (5) Pengeluaran Perkapita (X_5) adalah jumlah rata-rata dari belanja (pengeluaran) perkapita dalam setahun yang didasarkan pada harga konstan, kemudian dibagi dengan paritas daya beli

untuk periode 2004 – 2013 yang dinyatakan dalam satuan rupiah. (6) Jumlah Penduduk Miskin (Y) merupakan keseluruhan penduduk yang tidak dapat memperoleh sumber daya sesuai standar hidup yang layak guna memenuhi kebutuhannya, untuk masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2004 sampai dengan 2013 yang dinyatakan dalam satuan jiwa.

Teknik analisis data dalam penelitian adalah analisis linear berganda, asumsi klasik, Uji F dan Uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh variabel Pertumbuhan ekonomi (X_1), angka harapan hidup (X_2), rata - rata lama sekolah (X_3), angka melek huruf (X_4) dan pengeluaran perkapita (X_5), terhadap jumlah penduduk miskin (Y) di Provinsi Bali tahun 2004 - 2013, diperoleh persamaan sebagai berikut

$$\hat{Y} = 248,881 - 6,174\hat{X}_1 - 0,537\hat{X}_2 - 1,515\hat{X}_3 - 0,330\hat{X}_4 - 0,176\hat{X}_5$$

$$SE = (1,196) \quad (0,226) \quad (0,658) \quad (,143) \quad (0,063)$$

$$t_{hit} = (-5,164) \quad (-2,376) \quad (-2,302) \quad (-2,307) \quad (-2,802)$$

$$Sig = (0,000) \quad (0,020) \quad (0,024) \quad (0,024) \quad (0,006)$$

$$F_{hitung} = 29,355 \quad Sig = (0,000)$$

$$R^2 = 0,636$$

Berdasarkan hasil uji, didapatkan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $29,355 > 2,32$ serta sig. uji F $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata - rata lama sekolah ,

angka melek huruf dan pengeluaran perkapita serempak memengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali secara signifikan.

Pada penelitian ini diperoleh nilai $R^2 = 0,636$ atau 63 persen. Ini menunjukkan sebanyak 63 persen jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dalam penelitian ini dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata - rata lama sekolah , angka melek huruf dan pengeluaran perkapita, sedangkan sebesar 37 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian.

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hipotesis dengan menggunakan taraf nyata 5 persen, didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-5,164 < 1,662$) nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, ini artinya bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Artinya apabila terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin menurun sebesar 6.174 jiwa.

Saat ini umlah penduduk miskin pada bulan September 2015 sekitar 218,79 ribu orang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 persen. Semakin besar pertumbuhan yang tercipta akan mampu menekan jumlah penduduk miskin yang ada secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, pemerintah mesti meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Didukung oleh Wongdesmiwati (dalam jurnal Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, 2010:46) mengatakan ada hubungan negative antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Okta Ryan Pranat, (Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011), mengatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada kemiskinan. Ini artinya bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan akan menurun

Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hipotesis dan dengan menggunakan taraf nyata 5 persen, didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,376 < 1,662$) signifikansi Uji t sebesar $0,020 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti adanya pengaruh negatif dan signifikan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Kenaikan angka harapan hidup sebesar 1 tahun akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,537 ribu jiwa (537 orang).

Hasil ini memperkuat teori yang menyatakan tingginya daya hidup (umur) suatu masyarakat didukung oleh pola hidup serta tingkat kesehatan dari negara dimana mereka berasal sehingga secara finansial kesempatan yang dimiliki untuk mencapai penghasilan yang jauh lebih tinggi. Berikutnya Lincoln Arsyad, (1999) menyebutkan bahwa campur tangan dari kalangan pemerintah membantu membenahi kesehatan serta menjadi alat untuk membuat keputusan (kebijakan) untuk memberantas angka kemiskinan. Faktor penting yang menjadi dasar acuan

dalam membuat regulasi ini adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak mampu melalui perbaikan dari segi kesehatan, diasumsikan bahwa kesehatan yang baik akan memacu daya kerja masyarakat meminimalisir tingkat absen serta memacu kenaikan daya kerja. Didukung juga oleh penelitian Samsubar Saleh (2002), Apriliyah S.N (2007), dan Nur Tsaniyah (2009) mengatakan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Rata – Rata Lama Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hipotesis dan dengan menggunakan taraf nyata 5 persen, didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,302 < 1,662$) signifikansi Uji t $0,024 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan rata-rata lama sekolah pada jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari rata – rata lama sekolah sebesar $-1,515$ signifikan berpengaruh negatif secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti kenaikan rata – rata lama sekolah sebesar 1 tahun akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.515 jiwa (1.515 orang). Semakin besar rata - rata lama sekolah akan memberikan dampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin dan sebaliknya semakin kecil angka rata – rata lama sekolah akan meningkatkan jumlah penduduk miskin yang ada.

Hasil ini sesuai dengan teori yang dinyatakan Todaro (2000) bahwa jangka waktu untuk menempuh pendidikan menjadi faktor krusial yang memengaruhi jumlah penerimaan. Salah satu alat ukur latar belakang pendidikan dalam suatu kawasan (daerah) adalah rata-rata dari lamanya waktu tempuh pendidikan, salah

satunya dapat ditunjukkan dalam bentuk modal manusia (human capital). Terkait dengan pernyataan tersebut, Septyana (2013) dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa lamanya waktu tempuh untuk jenjang pendidikan berbanding terbalik (negative) dengan jumlah penduduk yang kurang mampu.

Angka Melek Huruf terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hipotesis dan dengan menggunakan taraf nyata 5 persen, didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,307 < 1,662$) nilai signifikansi Uji t yaitu $0,024 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya ada pengaruh negatif dan signifikan antara angka melek huruf terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari angka melek huruf sebesar $-0,330$. Hal ini berarti kenaikan angka melek huruf sebesar 1 tahun akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,330 ribu jiwa (330 orang). Semakin meningkatnya angka melek huruf akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada sebab kenaikan tingkat pendidikan individu akan menstimulasi kenaikan laju produktivitas dari pekerja. Latar belakang pendidikan diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh individu atau kalangan komunitas tertentu guna memperoleh taraf hidup dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik.

Sesuai dengan yang penelitian Siregar dan Wahyuniarti (2008) serta Wongdesmiwati (2009) menyatakan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin maka diharapkan jumlah angka melek huruf terus naik agar jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali ini bisa berkurang. Individu dengan latar pendidikan yang bagus dapat menciptakan

pemikiran serta ide-ide baru terkait pilihan terbaik dalam menghasilkan barang dan jasa (Mankiew,2000).

Pengeluaran Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hipotesis dan dengan menggunakan taraf nyata 5 persen, didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,802 < 1,662$) nilai signifikansi Uji t sebesar $0,006 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya ada pengaruh negatif dan signifikan antara pengeluaran perkapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari pengeluaran perkapita sebesar $-0,176$. Hal ini berarti kenaikan pengeluaran perkapita sebesar 1000 rupiah akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,176 ribu jiwa (176 orang). Semakin meningkatnya pengeluaran perkapita dapat memberikan dampak pada jumlah penduduk miskin di suatu daerah sebab semakin tinggi tingkat pengeluaran perkapita menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Apriliah (2007) mengatakan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh konsumsi perkapita secara negatif dan signifikan. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan inflasi lebih rendah dari nominal pengeluaran rumah tangga pada periode yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yakni sebagai berikut:

- 1) Dari hasil analisis penelitian ini didapatkan simpulan bahwa pertumbuhan ekonomi, indikator komposit IPM dan pengeluaran perkapita secara serempak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali tahun 2004 – 2014. Penelitian ini menunjukkan sebesar 63 persen jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, indikator komposit IPM dan pengeluaran perkapita, sedangkan sebesar 37 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.
- 2) Dari hasil uji secara parsial, disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran per kapita masing-masing dapat memengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali secara negatif dan signifikan.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut ini:

- 1) Disarankan kepada pemerintah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di perkotaan agar lebih memprioritaskan membuka lapangan kerja sektor informal/wirausaha dimana pada umumnya masyarakat miskin melakukan kegiatan usaha berskala kecil (mikro). Sedangkan untuk di daerah perdesaan perlu menjalankan proyek-proyek investasi yang bersifat padat modal untuk membuka lapangan pekerjaan terutama di sektor pertanian. Disarankan

kepada pemerintah baik di pusat maupun di daerah melalui anggaran APBN dan APBD agar lebih meningkatkan lagi persentase alokasi anggarannya pada bidang pelatihan kewirausahaan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mental sumber daya manusia penduduk Indonesia utamanya dan Bali pada khususnya .

- 2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan diharapkan membuat kebijakan dalam perbaikan kesehatan dan tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas golongan miskin lebih produktif sebab apabila kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi serta meningkatkan pendapatan secara tak langsung. Program yang dapat dicanangkan dapat berupa jaminan kesehatan kerja atau penerapan aturan wajib cuti yang sering dilanggar oleh perusahaan.
- 3) Dalam meningkatkan kepekaan masyarakat akan pendidikan diperlukan komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah. Hal ini perlu terus ditingkatkan serta disosialisasikan agar dalam jangka panjang terwujud SDM yang berkualitas, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Walaupun pemerintah telah mencanangkan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun kurang memberikan dampak bagi masyarakat kurang mampu sehingga perlu adanya program yang memberikan keringan biaya secara penuh bagi siswa kurang mampu dan perbaikan fasilitas sarana pendukung dalam proses belajar mengajar. Misalnya, bantuan berupa alat tulis dan perlengkapan sekolah serta perbaikan kelengkapan sekolah seperti perpustakaan, meja serta bangku, dll.

- 4) Angka melek huruf menggambarkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Disini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan lembaga swadaya/ Universitas dalam menyusun program – program pengentasan buta aksara seperti pelatihan baca tulis bagi masyarakat yang dilakukan secara konsisten , pengenalan cara menghitung dan program pendidikan dasar lainnya.
- 5) Dalam pengeluaran perkapita yang menggambarkan tingkat daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan perlu adanya intervensi pemerintah dalam mengatur penetapan upah minimum regional yang seharusnya mampu mengakomodir pengeluaran belanja rumah tangga. Walaupun UMR sesuai dengan kriteria yang ditetapkan namun masih banyak perusahaan ataupun usaha yang menetapkan gaji di bawah UMR. Sehingga untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan perlu adanya peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama.

REFRENSI

- Artana Yasa , I Komang Oka. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Skripsi* Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali . 2015. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- Indunil De Silva and Sudarno Sumarto. 2014. Does Economic Growth Really Benefit The Poor? Income Distribution Dynamics And Pro-Poor Growth In Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 50, No. 2. TNP2K, Jakarta
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nehen, Ketut. 2012. *Perekonomian Indonesia*, Denpasar: Udayana University Press.
- Napitulu, Apriliyah S. 2007. Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9865/1/030501027.pdf>. Diakses 5 April 2016.
- Ryan, Okta Pranata Yudha. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Santosa ,Budi. 2013.Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol.5, No. 2, Juli 2013. Universitas Trisakti .Jakarta
- Saleh, Samsubar. 2002. Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, h. 87-102
- Septyana ,I.A Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2013. Beberapa Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 10, Oktober 2013*.

Sinegar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. 2006. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Skripsi* Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Todaro, P Michael dan Stephen C.Smith. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga ,Edisi Kedelapan*. Erlangga. Jakarta.

Tsaniyah, Nur. 2010. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus: 30 Privinsi). <http://eprints.undip.ac.id>. Diakses 5 April 2016.

UNDP. 2012. "*Human Development Report 2011*"

Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1*.

Wongdesmiwati. 2010. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika. Skripsi*